

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2022

Rendi Sopian ¹, Sofik Handoyo ²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

rendi20001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Kemandirian keuangan suatu wilayah diukur melalui kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan secara mandiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, mengevaluasi potensi peningkatan finansial, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif, menggunakan data sekunder keuangan dan dari Kemendagri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan faktor seperti status pemerintah daerah, umur administratif, dan luas wilayah tidak berpengaruh signifikan. Untuk meningkatkan kemandirian, diharapkan dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak untuk efisiensi pemungutan pajak, penyesuaian tarif retribusi sesuai kemampuan masyarakat, pengoptimalan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah agar dapat meningkatkan pendapatan lain yang sah.

Kata Kunci : Kemandirian, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The financial independence of a region is measured by its ability to manage and use financial resources independently. The purpose of this research is to identify factors that affect regional financial independence, evaluate the potential for financial improvement, and provide recommendations for improving the quality of public services. The method used is quantitative with a comparative causal approach, using secondary financial data and from the Ministry of Home Affairs from 27 Regency / City Regional Governments in West Java Province during the period 2018-2022. The results showed that local revenue has a significant positive effect on financial independence, while factors such as local government status, administrative age, and area have no significant effect. To increase

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

independence, it is expected to recollect data on taxpayers for tax collection efficiency, adjust retribution rates according to the ability of the community, optimize the performance of Regional Owned Enterprises (BUMD), and utilize regional assets in order to increase other legal revenues.

Keywords : Independence, Regional Finance, Original Regional Income

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia sebelumnya bersifat sentralistik, menyebabkan ketidakmerataan keadilan di seluruh negara. Namun, kini sistem pemerintahan berubah menjadi era otonomi daerah atau desentralisasi, sejak tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah ini dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan esensi dari desentralisasi pemerintahan dan sangat mendorong demokrasi. Penerapan otonomi daerah didukung oleh beberapa alasan, termasuk ketidakmerataan pembangunan yang terjadi, ketidakseimbangan pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta masih terdapat dominasi peran dari pemerintah pusat yang menghambat perkembangan pemerintahan daerah (Sidik et al, 2002). Secara keseluruhan, implementasi kebijakan otonomi daerah adalah hasil dari permintaan daerah-daerah di Indonesia untuk memiliki peran yang lebih besar serta kemandirian untuk mengurus wewenang serta tanggung jawab mereka terkait pelayanan masyarakat dan pembangunan lokal (Azwar, 2023).

Implementasi Undang - Undang No. 23 tahun 2014 harapannya, akan meningkatkan aksesibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini dilakukan dengan memastikan alokasi dana yang strategis serta pengawasan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya keuangan, khususnya kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta layanan publik. Menurut peraturan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus keuangannya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi, serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Dalam penerapannya, upaya untuk mencapai kemandirian keuangan daerah masih menghadapi terdapat beberapa tantangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiaji & Adi (2007), penerapan desentralisasi yang berkaitan dengan keuangan benar-benar meningkatkan ketergantungan terhadap peran pemerintah pusat mengingat fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak bisa memenuhi kebutuhan belanja pada wilayah tersebut. Widodo (2011), H. Susanto (2014), dan Herawati et al. (2008) melakukan penelitian lebih lanjut, dan hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa beberapa daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan hasil rasio dari kemandirian keuangan daerah masih kecil.

Berdasarkan beberapa penelitian, kurangnya kemandirian keuangan daerah terdapat penyebab yang berbeda. Hidayat et al. (2016) menyoroti terbatasnya PAD, serta beban pengeluaran signifikan dalam APBD. Sementara itu, Zaenuddin (2014) menekankan bahwa penyebabnya adalah jumlah transfer dari pemerintah pusat, total bantuan, pembiayaan pemerintah serta potensi ekonomi. Selanjutnya, menurut Syam & Zulfikar (2022) beberapa alasan

penyebabnya adalah termasuk PAD yang rendah dan pengelolaan serta penggunaan PAD yang belum optimal dalam menerapkan otonomi daerah.

Tidak ada satupun daerah yang diklasifikasikan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi di wilayahnya. Hasil evaluasi ini mengikuti kategorisasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (2017), yang menetapkan bahwa suatu daerah dianggap mandiri dalam pengelolaan keuangan jika proporsinya melebihi 75%. Namun, kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat masih jauh lebih besar, yaitu sebesar 33,7% dari total pendapatan daerah, jika dibandingkan Jawa Tengah serta DI Yogyakarta sebagai provinsi lain di Pulau Jawa. Namun demikian, pemerintah daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat belum sepenuhnya bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, terlihat dari relatif kecilnya porsi PAD Jawa Barat dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya. Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji tingkat kemandirian keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian Haerani & Munandar (2022) menunjukkan hasil perhitungan rasio tingkat dari kemandirian keuangan daerah untuk periode tahun anggaran 2016 hingga 2020 adalah sebesar 57,66%. Selain itu, dalam penelitian Suryani (2019) hasil perhitungan rasio tingkat dari kemandirian keuangan daerah untuk periode 2014 hingga 2018 adalah sebesar 44,61%, yang menunjukkan angka yang masih rendah.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah antar pemerintah daerah di Jawa Barat, terutama antara Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata persentase kemandirian keuangan Kota Depok mencapai 80,87%, yang dapat diklasifikasikan sebagai tinggi dengan pola hubungan delegatif. Ini diperkuat oleh peningkatan pengeluaran dan pendapatan wilayah tersebut pada tahun 2020 dan 2021, menunjukkan kemampuan Kota Depok dalam menjalankan otonomi daerah untuk mengimplementasikan anggaran pendapatan dan mengelola pendapatan asli daerah secara efisien. Sebaliknya, rata-rata persentase kemandirian keuangan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode yang sama hanya sebesar 11,56%, menunjukkan klasifikasi yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yang mengindikasikan bahwa keuangan Kabupaten Tasikmalaya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah, melakukan evaluasi terhadap potensi peningkatan finansial masing-masing daerah, serta memberikan saran yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2013) Sejauh mana suatu daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah disebut sebagai tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Siregar & Pratiwi (2017) Kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai operasi, kemajuan, dan layanan publiknya secara mandiri. Hal ini

dicapai dengan menggunakan uang yang diperoleh dari sumber pendapatan utama di daerah tersebut, seperti pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat.

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk secara mandiri dalam mendanai kegiatan pemerintahannya, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, melakukan pembangunan, serta menyediakan layanan kepada masyarakat dilibatkan dalam Kemandirian Keuangan Daerah. Penggunaan dana yang diperoleh dari retribusi dan pajak yang telah dibayarkan oleh penduduk sebagai sumber utama pendapatan bagi daerah tersebut (Halim & Kusufi, 2014). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang disebut Kemandirian Keuangan Daerah adalah merujuk pada kesanggupan untuk mengelola pendanaan dan tanggung jawab moneter secara otonom, sejalan dengan pelaksanaan mandiri dalam konteks prinsip desentralisasi.

Kemampuan daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta pembangunannya mandiri tanpa harus bergantung pada keuangan dari pemerintah pusat merupakan syarat mutlak agar daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah terutama ditujukan untuk mencapai tujuan kemandirian daerah. Taraf kemandirian keuangan daerah bisa diketahui dengan membandingkan keseluruhan perolehan yang diterima dari pemerintah pusat dengan pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber lokal. Berdasarkan rasio kemandirian, taraf ketergantungan Pemerintah Daerah atas pemerintah pusat akan menurun seiring meningkatnya rasio kemandirian. Sisi lain, jumlah ketergantungan daerah atas bantuan pemerintah pusat akan meningkat secara proporsional dengan semakin kecilnya rasio kemandirian daerah (DJPK Kemenkeu, 2011).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan Rasio yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan yang dikumpulkan dari pemerintah daerah dengan jumlah uang yang ditransfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar akan dicapai oleh daerah tersebut jika nilai persentasenya lebih tinggi.

Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2016)

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang menilai sejauh mana Pemerintah Daerah tergantung pada bantuan finansial dari pemerintah pusat, serta kemampuannya dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola anggaran tanpa ketergantungan eksternal. Selain itu, rasio ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam taat dalam pembayaran pajak dan retribusi lokal yang dapat meningkatkan rasio tersebut. Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan tidak hanya mencerminkan kesehatan finansial suatu daerah, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah menghadapi otonomi daerah, khususnya dalam hal keuangan, penilaian dilakukan dengan melihat seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan dapat dilakukan hanya dengan bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Daerah (Kustianingsih et al., 2018). Ketika proporsi pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sumber lain, maka hubungan keuangan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dianggap optimal. Akan terjadi pola hubungan kemandirian keuangan antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dan pola ini akan dipengaruhi oleh hubungan kewenangan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain.

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2016)

Afarahim (2013) mengidentifikasi empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah :

1. Pola hubungan instruktif mengacu pada situasi di mana pemerintah daerah mendapatkan arahan dan bimbingan yang luas dari pemerintah pusat, yang menghasilkan tingkat kontrol lebih tinggi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan kemandirian Pemerintah Daerah. daerah yang menunjukkan pola hubungan ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki kapasitas yang terbatas atau terganggu untuk melakukan kegiatan pemerintahan sendiri, yang ditandai dengan tingkat otonomi yang sangat rendah.
2. Pola hubungan konsultatif mengacu pada situasi di mana kontrol dan keterlibatan pemerintah pusat telah berkurang karena peningkatan kapasitas pemerintah daerah. daerah-daerah yang menunjukkan pola hubungan saling ketergantungan ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang memiliki kapasitas yang rendah untuk menjalankan urusannya secara mandiri.
3. Pola hubungan partisipatif mengacu pada situasi di mana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat berkurang seiring dengan meningkatnya otonomi daerah. daerah yang menganut pola hubungan ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang hampir memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan urusannya sendiri secara mandiri.
4. Pola hubungan delegatif mengacu pada situasi di mana pemerintah pusat sangat mengurangi atau bahkan sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan urusan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh pencapaian tingkat kematangan dan kapasitas otonom yang signifikan dari pemerintah daerah. Wilayah yang menunjukkan pola hubungan ini bisa dikategorikan selaku wilayah yang bisa melangsungkan urusannya sendiri secara efisien.

Identifikasi Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, seperti pajak dan retribusi. Fungsi PAD sangat penting karena memberikan dasar finansial bagi pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan mengandalkan PAD, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan dalam pengelolaan anggaran dan dapat lebih cepat menanggapi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan PAD juga mendorong partisipasi warga dalam membayar pajak, yang pada gilirannya membantu pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian daerah (Halim, 2013). Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan sejumlah penerimaan yang diterima oleh suatu daerah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak, Retribusi, Hak Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Pendapatan Asli Daerah yang sah.

H1: Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik pula tingkat kemandirian keuangan daerah

Status Pemerintah Daerah

Status Pemerintah Daerah adalah pengakuan formal atas penetapan suatu daerah sebagai kota atau kabupaten. Pemerintah daerah di Indonesia disebut sebagai pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan pembagian administratif di bawah tingkat provinsi. Kota dan kabupaten dapat mengatur dan mengendalikan badan pemerintahan mereka sendiri karena keduanya memiliki yurisdiksi yang sama. Status pemerintah daerah juga dapat dikaitkan dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat nasional. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah membuat aturan tentang pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Tujuan dari pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih baik.

H2: Pemerintah Daerah dengan status Kota Madya akan lebih baik tingkat kemandirian keuangannya dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Umur Administratif Pemerintah Daerah

Setyaningrum & Syafitri (2012) menjelaskan bahwa usia suatu pemerintahan daerah merujuk pada tahun di mana pemerintahan provinsi tersebut didirikan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku di wilayah tersebut. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Struktur pemerintahan provinsi mencakup pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerintahan dengan prinsip otonomi serta tugas pembantuan, dengan tujuan mencapai tingkat pemerintahan setinggi mungkin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah, yang

bertugas sebagai koordinator pemerintah daerah dan mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mandiri.

H3: Semakin lama umur administratif suatu daerah, maka semakin baik pula kemandirian keuangan daerah tersebut.

Luas Wilayah Pemerintah Daerah

Aset yang dimiliki suatu Pemerintah Daerah menentukan tarafnya, yang tercermin dari luas wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah mencerminkan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana. Semakin besar wilayah suatu daerah, semakin banyak sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk memastikan pelayanan publik yang baik. Dalam penelitian ini, luas wilayah diukur dengan satuan angka sebagai ukuran daerah kekuasaan. Setiap daerah memiliki luas yang berbeda, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana serta potensinya juga bervariasi. Daerah yang lebih luas memerlukan lebih banyak sarana dan prasarana. Pemerintah daerah harus menyediakan layanan yang memadai sesuai dengan luas wilayahnya. Oleh karena itu, luas wilayah menjadi indikator penting dalam menentukan kebutuhan daerah. Besarnya wilayah menunjukkan jumlah sarana yang dibutuhkan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan penyediaan sarana dan prasarana dengan luas wilayah masing-masing. Potensi setiap daerah juga berbeda, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana harus disesuaikan untuk memastikan pelayanan publik yang optimal.

H4: Semakin luas wilayah suatu daerah, maka semakin baik tingkat kemandirian keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kausal-komparatif digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor independen dan variabel dependen melalui uji hipotesis. Dengan fokus pada analisis kuantitatif terhadap sampel atau populasi yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mendalam tentang dinamika kompleks yang ada dalam fenomena yang sedang dipelajari. Populasi pada penelitian ini ialah kabupaten/kota di Jawa Barat yang terdiri atas 9 Kota dan 18 Kabupaten. Penelitian ini menerapkan teknik *total sampling*, yang mana seluruh populasi akan jadi sampel. Data yang diterapkan studi ini ialah data sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan data dari Kemendagri yang berupa data *time series* pada 2018 – 2022. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23 guna memvalidasi hasil penelitian dan memastikan keakuratannya. Penyederhanaan metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disebutkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data dengan melihat nilai rata-rata, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel (Sugiyono, 2022). Penelitian ini mencakup empat variabel X dan satu variabel Y. Variabel X meliputi pendapatan asli daerah, status pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, dan luas wilayah pemerintah daerah, sedangkan variabel adalah kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1.1 Hasil Uji Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan Daerah	135	7.92	89.76	34.9015	23.22120
Pendapatan Asli Daerah	135	6.98	45.26	22.7615	11.33228
Umur Administratif Pemda	135	6.00	540.00	240.0000	199.39891
Luas Wilayah Pemda	135	37.36	4146.00	1361.4650	1161.96540
Valid N (listwise)	135				

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian *Software* SPSS dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* tercatat sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi melebihi 0,05. Karena nilai signifikansi yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 5% (taraf nyata signifikansi penelitian), dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau residual data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas data.

Tabel 1.2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00565752
Most Extreme Differences	Extreme Absolute Positive	.042
	Negative	-.026
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

2. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian *Software* SPSS, nilai uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,906 dimana hasil tersebut diantara -2 sampai +2, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi.

Tabel 1.3 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983 ^a	.965	.964	2.62841	1.906

- a. Predictors: (Constant), LWP_X4, UP_X3, PAD_X1, SP_X2
- b. Dependent Variable: KKD_Y

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

3. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian Software SPSS, koefisien yang dilihat adalah VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen, diperoleh bahwa tidak terdapat Multikolinearitas karena setiap variabel memenuhi ketentuan yaitu nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.10.

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinearitas

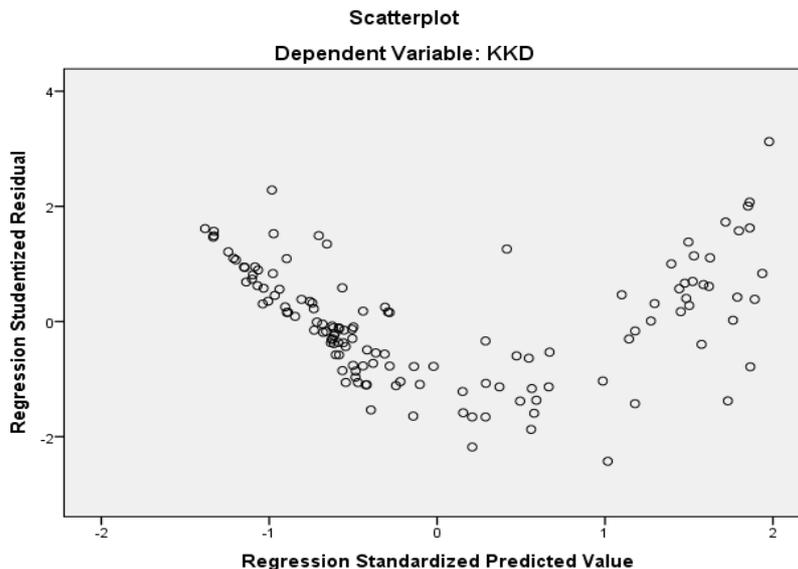
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.702	1.424
Status Pemerintah Daerah (X2)	.340	2.940
Umur Administratif Pemerintah Daerah (X3)	.849	1.177
Luas Wilayah Pemerintah Daerah (X4)	.429	2.331

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

4. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian Software SPSS, tidak ada pola tertentu dan titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-12.536	.978	
Pendapatan Asli Daerah (X1)	2.085	.028	1.018
Status Pemerintah Daerah (X2)	-1.497	.955	-.030
Umur Administratif Pemerintah Daerah (X3)	-.001	.001	-.011
Luas Wilayah Pemerintah Daerah (X4)	.001	.000	.029

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan dari hasil analisis pada tabel 4.5, maka rumus regresi pada penelitian ini adalah :

$$Y_{it} = (-12.536) + 2.085 X1_{it} - 1.497 X2_{it} - 0.001 X3_{it} + 0.001 X4_{it} + e$$

1. Konstanta bernilai sebesar (-12.536), Nilai ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) bernilai nol, maka nilai prediksi dari variabel dependen (Y) adalah -12.536. Ini adalah titik awal atau baseline dari model regresi.
2. Koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar (2.085) hal ini menyatakan Setiap peningkatan satu unit pada X1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 2.085, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa X1 memiliki hubungan positif dengan Y.
3. Koefisien Status Pemerintah Daerah sebesar (-1.497) hal ini menyatakan Setiap peningkatan satu unit pada X2 akan mengurangi nilai Y sebesar 1.497, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa X2 memiliki hubungan negatif dengan Y.
4. Koefisien Umur Administratif Pemerintah Daerah (-0.001) hal ini menyatakan Setiap peningkatan satu unit pada X3 akan mengurangi nilai Y sebesar 0.001, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Pengaruh X3 terhadap Y sangat kecil dan negatif.
5. Koefisien Luas Wilayah Pemerintah Daerah (0.001) hal ini menyatakan, Setiap peningkatan satu unit pada X4 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0.001, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Pengaruh X4 terhadap Y sangat kecil dan positif.

6. Uji Hipotesis

Koefisiensi Determinan

Tabel 1.6 Hasil Uji Koefisiensi Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983 ^a	.965	.964	2.62841

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan Tabel 6 nilai Koefisiensi Determinasi (R.Square) pada variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,965 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 96,5% terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah (variabel dependen). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Uji Parsial (T)

Tabel 1.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12.536	.978		-12.813	.000
PAD (X1)	2.085	.028	1.018	75.132	.000
SP (X2)	-1.497	.955	-.030	-1.567	.120
UP (X3)	-.001	.001	-.011	-.899	.370
LWP (X4)	.001	.000	.029	1.655	.100

Sumber : Output SPSS v.23.0 (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan dari hasil analisis Uji Parsial pada tabel 4.7, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 75.132 lebih besar dibandingkan nilai t tabel sebesar 1.656 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.
- b. Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Status Pemerintah Daerah (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar -1.567 lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1.656 dengan tingkat signifikansi $0,120 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah (SP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ini berarti perubahan dalam status pemerintah daerah tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
- c. Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Status Pemerintah Daerah (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar -0,899 lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1.656 dengan tingkat signifikansi $0,370 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Umur Pemerintah Daerah (UP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ini berarti usia atau lama berdirinya pemerintah daerah tidak berdampak signifikan pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
- d. Pengaruh Luas Wilayah Pemerintah Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil koefisien t hitung menunjukkan bahwa variabel Status Pemerintah Daerah (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 1.655 lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1.656 dengan tingkat signifikansi $0,100 > 0,05$. Hal Ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah Pemerintah Daerah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah. Ini berarti luas wilayah tidak memainkan peran penting dalam menentukan seberapa mandiri keuangan suatu daerah.

PEMBAHASAN DARI HASIL PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga dapat disimpulkan jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik pula tingkat kemandirian keuangan daerah dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat/provinsi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti & Ishak (2022), Apriana & Suryanto (2010), dan Sanga et al. (2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan memiliki sumber pendapatan yang berasal langsung dari aktivitas ekonomi di wilayahnya sendiri, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Secara umum, daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang sama untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Namun Pemerintah kota sering kali tidak memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya alam, ekonomi, dan manusia dibandingkan pemerintah kabupaten. Hal ini akan dapat menghambat kinerja pemerintah daerah menjadi kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kurangnya sumber daya yang memadai dapat menghambat perkembangan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan layanan publik yang lebih luas, dan dukungan terhadap inisiatif ekonomi lokal. Oleh karena itu, kendali yang terbatas terhadap sumber daya ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Status Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Status Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah dengan status Kota Madya tidak selalu lebih baik tingkat kemandirian keuangannya dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Pratiwi (2017) menemukan bahwa Status Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan metodologi penelitian yang digunakan, variabel yang diteliti, dan konteks lokal masing-masing studi. Perbedaan dalam teknik analisis, sampel, atau periode waktu dapat mempengaruhi hasil yang ditemukan. Selain itu, faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah atau kondisi ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat juga dapat memainkan peran penting.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dengan status Kota Madya tidak selalu memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pendapatan asli daerah yang terbatas karena luas wilayah Kota Madya yang relatif lebih kecil dan kurangnya sumber daya

alam yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Fokus ekonomi Kota Madya lebih terpusat pada sektor jasa dan perdagangan sehingga membuatnya lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dibandingkan dengan Kabupaten yang mungkin memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan seimbang mencakup sektor – sektor seperti pertanian, industri, pariwisata atau yang lainnya sehingga memberikan kontribusi pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Umur Administratif Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Umur Administratif Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga dapat disimpulkan Semakin lama umur administratif suatu daerah, tidak menjamin tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) menemukan bahwa Umur Administratif Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun Umur Administratif Pemerintah Daerah mungkin mempengaruhi berbagai aspek administratif atau operasional, faktor tersebut tidak memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa umur administratif suatu pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Pada beberapa Pemerintah Daerah dengan umur administratif yang lebih tua masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif dan efisien. Sebaliknya, Pemerintah Daerah dengan umur yang relatif lebih muda bisa saja mengembangkan strategi baru yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah dan keberlanjutan keuangan. Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada umur administratif, tetapi lebih pada kemampuan dalam mengadopsi praktik terbaik dan kebijakan yang sesuai dengan konteks dan tantangan saat ini.

Luas Wilayah Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Luas Wilayah Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga dapat disimpulkan Semakin luas wilayah suatu daerah, tidak menjamin semakin baik tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Pratiwi (2017) menemukan bahwa Luas Wilayah Pemerintah Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan kata lain, luas wilayah suatu daerah tidak secara langsung berhubungan dengan tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti manajemen aset dalam pengelolaan kekayaan wilayah tersebut.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luasnya wilayah suatu daerah tidak selalu berarti tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik. Daerah yang lebih luas mungkin memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi, namun tanpa infrastruktur yang memadai atau dengan kepadatan penduduk yang rendah, maka potensi pendapatan asli daerah dari segi pajak daerah

maupun retribusi atas layanan kepada masyarakat tersebut tidak bisa dimaksimalkan. Selain itu, manajemen yang efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Status Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Umur Administratif Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Luas Wilayah Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Daerah diharapkan melakukan beberapa upaya, seperti melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, meningkatkan retribusi melalui penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih menguntungkan sehingga memberikan dividen yang dapat disetorkan ke kas daerah, serta melakukan optimalisasi penggunaan aset daerah seperti tanah, bangunan, dan fasilitas umum dengan disewakan kepada masyarakat atau pihak swasta agar menghasilkan pendapatan lain - lain PAD yang sah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti Belanja Daerah, Infrastruktur dan Aksesibilitas, Kualitas Pemerintahan, serta Tingkat Pendidikan Penduduk yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, Penggunaan sumber data terbaru dan perluasan rentang waktu penelitian hingga 10 tahun agar meningkatkan validitas dan akurasi hasil dari penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Afarahim. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010*.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 68–79.
- Azwar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i1.2118>
- Bawono, B. G. T. (2008). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, R. C. , A. S. , & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea*, 704–719.
- Haerani, N., & Munandar, A. (2022). Analisa Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 1–8.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Halim, M. A. (2018). Teori Ekonomi Makro. *Jakarta: Mitra Wacana Media*. Hidayat, M., Hadi, M. F., & Widiarsih, D. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*, 4(2), 36–55.
- Kuncahyono, H. (2015). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Timur*.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta*.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250.
- Nunik Retno Herawati, S. (n.d.). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Penelitian Di Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 41–67.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(3), 705–719.

- Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (n.d.). *Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012a). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012b). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.
- Sidik, M., & dan Masyarakat, L. P. E. (2002). Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. (*No Title*).
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017a). The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and human development index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71.
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017b). THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS AND FINANCIAL INDEPENDENCE ON ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA. *Journal of Management and Entrepreneurship*, 19, 65–71. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158358957>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, I. (n.d.). *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018*.
- Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik pemerintah daerah pendorong kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 10(1), 15–26.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
- Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis flypaper effect pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. *Jumabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2).
- Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.`216>
- Widodo, P. (2011). *Analisis kemampuan dan efektifitas keuangan daerah empat kabupaten di Pulau Madura dalam era otonomi daerah*.
- Yulianto, Y., Mulyana, N., & Hutagalung, S. (2018). Adoption of Local Values for Bureaucratic Reform in Lampung Province. *MIMBAR, The Journal of Social and Development*, 34(1), 2432.
- Zaenuddin, M. (2014). Rendahnya Kemandirian Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 4(2).